

ANALISIS KOMPENSASI TERHADAP PEMRAKARSA DALAM KERJA SAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA PADA PROYEK SPAM JATILUHUR I

Oleh

Wah Estuning Maryati¹ dan Ninik Darmini²

INTISARI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme kompensasi yang diberikan kepada pemrakarsa ditinjau dari persaingan usaha tidak sehat dalam tender dan untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan kompensasi yang diberikan kepada pemrakarsa dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha pada proyek SPAM Jatiluhur I.

Ditinjau dari sudut sifatnya, penelitian dalam bentuk tesis ini dapat dikualifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis dikarenakan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini adalah berjenis yuridis-empiris. Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi kepustakaan, dengan cara pengumpulan data melalui wawancara pada Konsorsium PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk – PT Wijaya Karya (Persero), Tbk – PT Tirta Gemah Ripah dengan narasumber Saudara Randal Tarigan sebagai koordinator komersial dan administrasi kontrak dan Saudari Novita Mustika Dewi sebagai staf Legal.

Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa kompensasi *Right to match* yang diberikan kepada pemrakarsa pada Proyek SPAM Jatiluhur I bukan merupakan sebuah tindakan persaingan tidak sehat dalam bisnis ataupun sebuah monopoli dikarenakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang adanya perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti persaingan serta adanya penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Praktik pelaksanaan kompensasi yang diberikan kepada pemrakarsa dalam kerja sama pemerintah dan badan usaha pada Proyek SPAM Jatiluhur I disebut KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Kata kunci: Perjanjian, Tender, Kompensasi

¹ Mahasiswa Program S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**COMPENSATION ANALYSIS OF INITIATOR IN GOVERNMENT
AND BUSINESS ENTITY COOPERATION
IN SPAM JATILUHUR 1 PROJECT**

by

Wah Estuning Maryati and Ninik Darmini

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analyze the compensation mechanism given to the initiator in terms of unfair business competition in the tender and to know and analyze the practice of implementing compensation given to the initiator in cooperation between the government and business entities in the Jatiluhur I SPAM project.

In terms of its nature, the research in the form of this thesis can be qualified as an analytical descriptive research because it is to provide data that is as precise as possible about humans, conditions, or other phenomena. The research is juridical-empirical type. As for the type of data used is secondary data through library studies, with the way of collecting data through interviews at Consortium PT Jaya Construction Manggala Pratama, Tbk – PT Wijaya Karya (Persero), Tbk – PT Tirta Gemah Ripah with the source Randal Tarigan as a commercial coordinator and contract administration and Novita Mustika Dewi as a legal staff.

The research results obtained that Right To Match Compensation for the Jatiluhur I SPAM Project is not an act of unfair competition in business or a monopoly because based on the provisions in Law Number 5 of 1999, it prohibits agreements and actions that are anti-competitive in nature and there is an abuse of the dominant position of business actors. The practice of implementing compensation given to the initiator in cooperation between the government and business entities in the Jatiluhur I SPAM Project is called PPP is a collaboration between the Government and Business Entities in the Provision of Infrastructure for the public interest with reference to the specifications previously set by the Minister, which partially or wholly use resources of the Business Entity by taking into account the distribution of risks among the parties.

Keywords: Agreement, Tender, Compensation